

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Teori

1. Hakikat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI)

Kehadiran Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesungguhnya mendahului Pendidikan Formal. Di masyarakat mana pun, pada saat pendidikan formal belum ada, warga masyarakat belajar sesuatu melalui PNFI.

Pendidikan Nonformal (*nonformal education*) menurut Coombs (1968) adalah setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara sengaja untuk melayani peserta didik tertentu guna mencapai tujuan belajarnya. (Trisnamansyah, 2007).⁷

Menurut Adikusumo (1986: 57) dalam bukunya Pendidikan Kemasyarakatan mengemukakan pengertian pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dimana seseorang memperoleh informasi-informasi pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat

⁷Isak Abdulhak dan Ugi suprayogi, Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 18-19.

kerterampilan, sikap-sikap peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga bahkan masyarakat dan negaranya.

2. Fungsi Pendidikan Nonformal dan Informal

Pendidikan Nonformal dan Informal memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pendidikan Luar Sekolah sebagai Substitute dari pendidikan sekolah. Artinya, bahwa pendidikan luar sekolah dapat menggantikan pendidikan jalur sekolah yang karena beberapa hal masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan di jalur persekolahan (formal). Contohnya: Kejar Paket A, B dan C.
2. Pendidikan Luar Sekolah sebagai Supplement pendidikan sekolah. Artinya, bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk menambah pengetahuan, keterampilan yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah. Contohnya: private, les, training.
3. Pendidikan Luar Sekolah sebagai Complement dari pendidikan sekolah. Artinya, bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak dapat diperoleh di dalam pendidikan sekolah. Contohnya: Kursus, try out, pelatihan.⁸

Dr. Karnadi dalam bimbingan menyatakan bahwa Pendidikan Luar Sekolah sebagai pemberdayaan Masyarakat, artinya masyarakat dapat diperdayakan melalui berbagai program kegiatan kemasyarakatan sehingga masyarakat akan memperoleh pengetahuan dalam kegiatan tersebut.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan salah satu contoh fungsi Pendidikan Luar Sekolah sebagai pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan Pendidikan Luar Sekolah.

⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_luar_sekolah (akses tanggal 16 Mei 2014 pukul 02.10 WIB)

3. Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.

81 Tahun 2013 mengenai satuan Pendidikan Nonformal antara lain:

Satuan PNF, terdiri atas:

- a. LKP;
- b. Kelompok Belajar;
- c. PKBM;
- d. Majelis Taklim; dan
- e. Satuan PNF sejenis.⁹

4. Program-program Pendidikan Nonformal dan Informal

Setelah mengetahui pengertian serta fungsi dari PNFI, maka untuk melengkapi pemahaman menyeluruh terutama bagaimana implementasinya di lapangan (di masyarakat), maka perlu ditunjukkan pula program-program PNFI tersebut. Program-program PNFI meliputi :

1. Pendidikan berkelanjutan (*continuing education*). Jenis-jenis pendidikan berkelanjutan :
 - a. Program pasca keaksaraan
 - b. Program pendidikan kesetaraan
 - c. Program pendidikan peningkatan pendapatan
 - d. Program peningkatan mutu hidup
 - e. Program pengembangan minat individu
 - f. Program berorientasi masa depan.¹⁰
2. Pendidikan orang dewasa (*adult education*). Jenis pendidikan orang dewasa antara lain :
 - a. program keaksaraan (*adult literacy*)
 - b. program pasca keaksaraan (pasca pendidikan dasar bagi orang dewasa)
 - c. pendidikan pembaharuan.
 - d. Pendidikan kader organisasi
 - e. Pendidikan populer.¹¹
3. Program-program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan di masyarakat. Meliputi :

⁹Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013

¹⁰ Ibid.hal.26

¹¹ Ibid.hal.26

- a. pendidikan keaksaraan (pemberantasan buta aksara).
- b. Pendidikan anak usia dini
- c. Pendidikan kesetaraan.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pendidikan pemberdayaan perempuan
- f. Pendidikan keterampilan hidup
- g. Pendidikan kepemudaan
- h. Pembinaan kelembagaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat (kursus-kursus).
- i. Pemberdayaan Masyarakat.¹²

Berdasarkan pada program PNFI diatas yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini melalui sebuah program pemerintah yaitu PNPM Mandiri Perkotaan.

4. Hakikat Program PNPM Mandiri Perkotaan

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat

¹² Ibid.hal.26

dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.¹³

Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun 2007, PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.¹⁴

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan, begitu juga nama generik lembaga kepemimpinan masyarakat berubah dari BKM menjadi LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat).¹⁵

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang tersebar di sekitar 1.153 kecamatan di 268 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 Juta

¹³ Buku Pedoman Pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan hal.20

¹⁴ Ibid.hal.20

¹⁵ Ibid.hal.20

orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 860 ribu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).¹⁶

PNPM Mandiri Perkotaan, selanjutnya disebut PNPM MP berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap/ perilaku/cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat dengan berbagai pihak (channelling program) untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya pada tahap akhir dari transformasi kondisi sosial menuju masyarakat madani, PNPM MP melakukan intervensi di lokasi padat, kumuh dan termiskin dengan melakukan kegiatan khusus. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan.¹⁷

Pelaksanaan program dimungkinkan terjadi perubahan kebijakan PNPM MP sebagai perbaikan dan penyempurnaan program dari hasil pembelajaran dan evaluasi tahun-tahun sebelumnya dan akan diatur secara khusus dalam bentuk suplemen dan pedoman teknis.

¹⁶ Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, hal.20

¹⁷ ibid

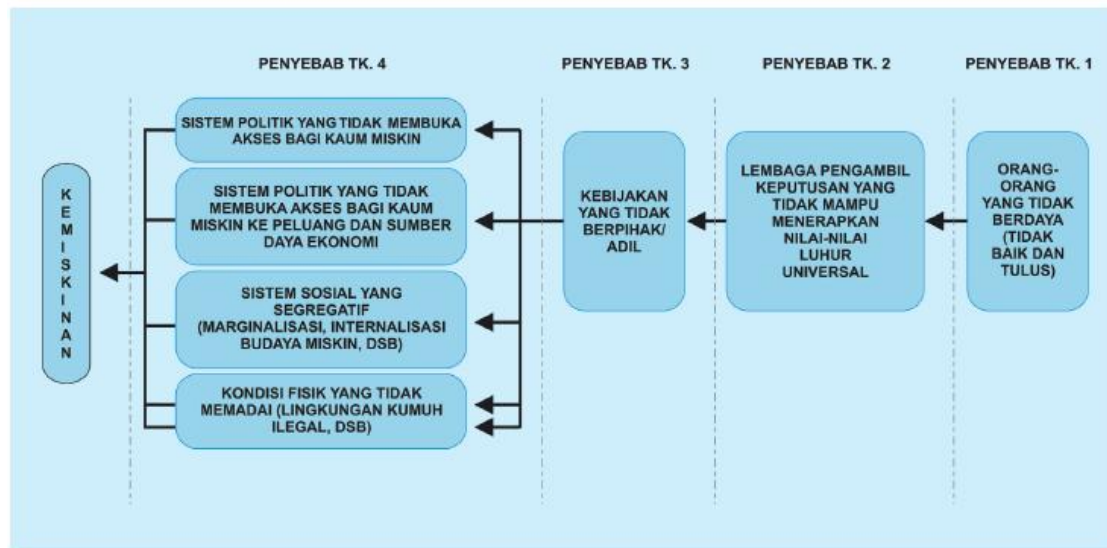
Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan santunan dalam kenyataannya sering justru menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan modal sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya modal sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi modal sosial masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat. Akibatnya menimbulkan kecurigaan, ketidakpedulian dan skeptisme di masyarakat.

Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini banyak terjadi di mana lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada belum berdaya, karena dikelola oleh orang-orang yang tidak berdaya yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kebijakan-kebijakan yang diputuskannya. Lembaga kepemimpinan semacam ini pada umumnya memang tidak mengakar. Pengurusnya tidak dipilih secara benar dan banyak menjadi perpanjangan tangan pihak-pihak tertentu sehingga lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar, parsial atau bahkan untuk

kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, terutama masyarakat miskin. Kondisi ini justru akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kondisi kelembagaan pimpinan masyarakat yang tidak mengakar dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi di mana masyarakat secara umum memang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada gilirannya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran.

Berdasarkan paparan di atas, cukup jelas menunjukkan bahwa kemiskinan akan tumbuh subur dalam situasi di mana perilaku/sikap dan cara pandang (paradigma) masyarakat yang belum berdaya. PNPM MP sebagai kelanjutan P2KP memahami bahwa kemiskinan adalah akibat dan akar penyebab kemiskinan yang sebenarnya adalah kondisi masyarakat, utamanya para pimpinan yang belum berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini:



Gambar II.1. Pandangan PNPM-MP tentang Akar Penyebab Kemiskinan

Pemahaman mengenai akar penyebab persoalan kemiskinan seperti di atas telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu kerah perubahan prilaku/sikap dan cara pandang masyarakat utamanya para pemimpin untuk senantiasa mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan pada nilai-nilai luhur universal, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan.

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh untuk terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam

kehidupan bermasyarakat sehari-hari sehingga pada giliran dapat dibangun kepemimpinan moral yang mandiri.

Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

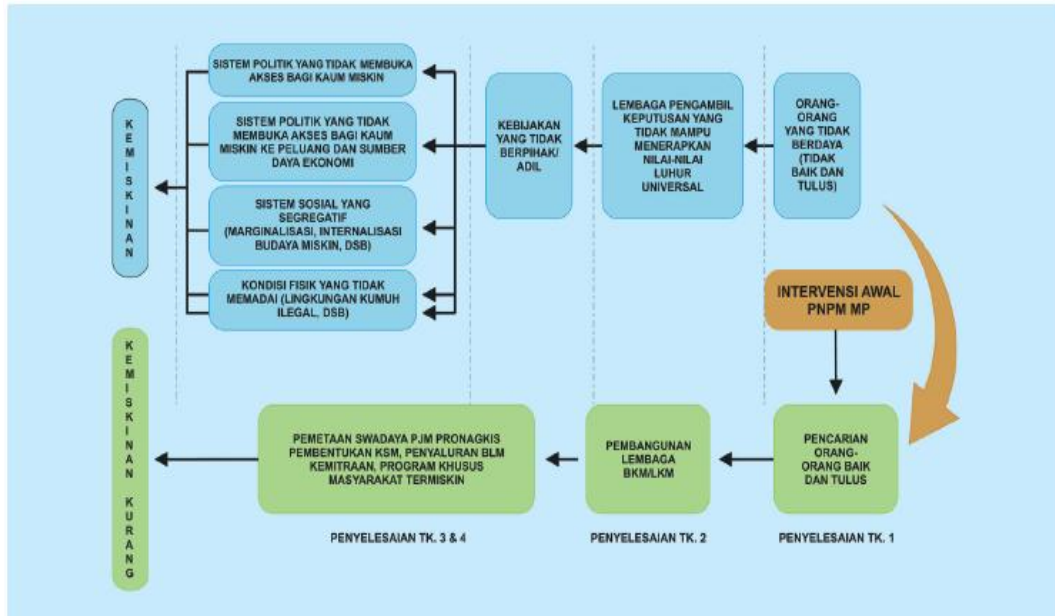
Gambaran lembaga masyarakat seperti dimaksud di atas hanya akan dicapai apabila orang-orang yang diberi amanat sebagai pemimpin masyarakat merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, tanpa pamrih dan jujur serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat miskin, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawanan, komitmen tersebut pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat. PNPM MP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa Program maupun pasca Program oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan/desa (KBK).

Penguatan lembaga masyarakat yang dimaksud PNPM MP terutama dititikberatkan pada upaya penguatan pelakunya untuk mampu menjadi pelaku nilai dan pada gilirannya mampu menjadi motor penggerak dalam 'melembagakan' dan 'membudayakan' kembali nilai-nilai luhur universal kemanusiaan (gerakan moral), prinsip-prinsip kemasyarakatan (gerakan tata pemerintahan yang baik) serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (gerakan Tridaya), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat.

Melalui lembaga kepemimpinan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Gambaran tentang cara pandang PNPM MP dalam memfasilitasi upaya penanggulangan akar persoalan kemiskinan oleh masyarakat dapat dilihat pada Gambar II.2.



Gambar II.2. Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat Melalui PNPM-MP

Sedangkan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mengedepankan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, dilakukan melalui; pelibatan intensif Pemerintah kota/kabupaten pada pelaksanaan siklus kegiatan PNPM MP, penguatan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D) agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) dan melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).

Secara umum prinsip, pendekatan dan dasar hukum PNPM-Mandiri Perkotaan menganut yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri sebagai berikut :

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- b. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- c. Partisipasi. masyarakat terlibat secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- d. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- e. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap

pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.

- g. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- h. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- i. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- j. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- k. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

- I. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola oleh masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat Pemerintah kota/kabupaten dan dari tingkat masyarakat.

Di tataran kecamatan inilah rencana pembangunan yang direncanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah) bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan sehingga dapat digalang perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan selaras waktu. Dengan demikian PNPM MP akan menekankan pemanfaatan Musrenbang Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program yang ada sehingga peranan Forum BKM/LKM tingkat kecamatan menjadi sangat vital.

Bersadarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan

memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

- a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program.
- b. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
- c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis.
- e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

Dasar hukum PNPM MP sebagaimana menjadi dasar hukum PNPM Mandiri adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

PNPM Mandiri Perkotaan bersifat stimulan dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya bahwa kegiatan yang akan diadakan masyarakat dalam rangka memenuhi ukuran keberhasilan program tidak semata-mata hanya berasal dari pemerintah tetapi harus ada upaya nyata dari warga masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang akan diadakan perlu didukung dari swadaya masyarakat, pemerintah daerah atau sumber dana lainnya. Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut

peduli terhadap peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Swadaya masyarakat dan pemerintah Kota Depok merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan.

Monitoring pencapaian pemerintah Kota Depok dalam hal ini adalah pihak Kelurahan Sukmajaya terhadap ukuran keberhasilan perlu dilakukan secara khusus dalam program ini untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian masyarakat di wilayah Kelurahan Sukmajaya dalam memenuhi seluruh indikator keberhasilan program. Proses monitoring ini dilakukan secara rutin setiap bulan selama tahap pelaksanaan kegiatan sampai menjelang dimulainya siklus tahun berikutnya.

Masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pelaku utama program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan seterusnya berfungsi sebagai fasilitator, pendamping, pembimbing dan pembina agar tujuan dapat dicapai dan prinsip-prinsip, kebijakan serta mekanisme program dapat dilaksanakan secara benar dan konsisten.

5. Hakikat Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan) yang berarti pemberian daya atau kekuatan kepada seseorang karena dia dianggap tidak berdaya atau kekuatan yang ada sangat kecil sehingga hampir tidak dapat berbuat apa-apa. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai pengembangan atau pemberdayaan manusia adalah proses pengembangan manusia agar memiliki kapasitas penuh, memiliki pilihan-pilihan yang lebih luas dan kesempatan yang lebih besar sehingga mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih bermanfaat dan lebih makmur.¹⁸

Permendagri RI Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat 8).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan masyarakat.¹⁹

Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah “meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian”. Berdasarkan

¹⁸ Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2010).

¹⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal.79

penjelasan tersebut, pemberdayaan dapat dilakukan pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas dan juga pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, sehingga dapat dikembangkan dan mencapai kemandirian.²⁰

Outcome dari suatu pemberdayaan merupakan hasil akhir dari apayang diperoleh masyarakat yaitu sebuah tingkat keberdayaan dan hal mengenai keberdayaan tersebutlah saat ini menjadi sesuatu yang menarik dan perlu adanya sebuah kajian agar dapat diketahui secara pasti mengenai keberdayaan yang telah diperoleh masyarakat apakah benar-benar di terapkan untuk kehidupan sehari-hari.

Definisi yang dikemukakan para ahli tersebut dapat disimpulkan, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk meperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki keprcayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian

²⁰ Ibid, hal.79

pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

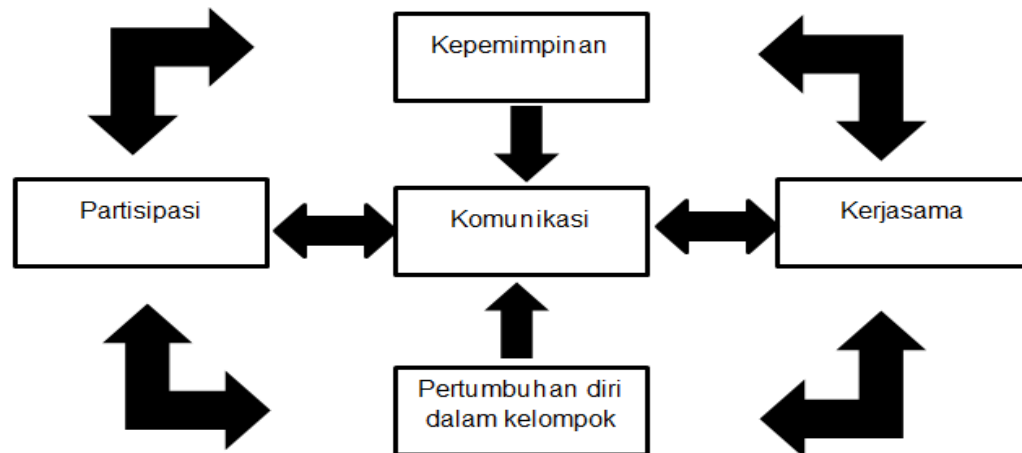
7. Interaksi dalam Kelompok Masyarakat

Interaksi dalam kelompok masyarakat merupakan kumpulan individu yang terintegrasi ke dalam dua unsur, yaitu integrasi emosional dan integrasi fungsional. Integrasi emosional terjadi karena adanya hubungan darah, adat, dan kekerabatan. Integrasi ini banyak kita jumpai dalam masyarakat tradisional khususnya di pedesaan. Biasanya dalam masyarakat tradisional integrasi diikat oleh adat, kekerabatan, dan darah masih sangat dominan. Dalam interaksi kelompok masyarakat seperti ini ikatan individu biasanya masih menganut kontrol sosial yang cukup ketat. Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran sosial, seperti perilaku percabulan, kriminalitas atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, biasanya berupa hukuman secara fisik atau mental dan cenderung keras.²¹

Terdapat empat faktor yang sangat mempengaruhi proses interaksi dalam kelompok masyarakat, yaitu faktor kepemimpinan, partisipasi, komunikasi dan kerjasama. Keempat faktor ini saling mempengaruhi serta menentukan arah dan kesinambungan suatu kelompok. Dari keempat faktor ini, kepemimpinan menjadi unsur penting dalam menciptakan partisipasi, komunikasi yang mendorong terjadinya kerjasama dalam kelompok. Selanjutnya proses interaksi dalam kelompok masyarakat yang

²¹Agung Widodo dkk, Teknik Dasar Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Yayasan Insan Sebadia, 2011).hal.9.

berjalan dengan baik akan bermanfaat bagi pengembangan diri para anggotanya. Secara skematik dapat diuraikan sebagai berikut :



Gambar II.3 Proses Interaksi Dalam Kelompok Masyarakat²²

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komponen penting dalam proses interaksi kelompok. Kemampuan pemimpin untuk merumuskan peranan apa yang diharapkan oleh para anggota dengan menjelaskan kepada mereka tentang apa, bagaimana, bilamana, dan di mana kegiatan-kegiatan dilaksanakan akan sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan suatu kelompok. Pemahaman yang jelas terhadap peran masing-masing anggota dan didukung oleh peranan pemimpin selaku fasilitator akan mendorong partisipasi anggota dalam menjalankan fungsinya dalam kelompok. Artinya, pimpinan yang mampu memainkan perannya sebagai

²² Ibid.

fasilitator akan menciptakan ruang bagi anggota kelompok untuk mengembangkan ide-ide, membangun komunikasi yang efektif antar anggota untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan kelompok.

2. Partisipasi

Melalui paparan tentang istilah peranan di atas, seorang pemimpin diharapkan dapat memotivasi dan menggerakkan anggota untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya para anggota diharapkan mau dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya bukan karena diperintah tetapi karena adanya kesadaran akan tanggung jawab untuk memberikan sumbangan kreasi atau daya cipta. Kesadaran seperti inilah yang disebut dengan partisipasi. Partisipasi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kata-kata tetapi juga tindakan yang terkendali dan terencana.

Munculnya partisipasi dalam kelompok akan memberikan manfaat antara lain :

- Merangsang kemandirian anggota yang akan mendukung keberhasilan program kelompok.
- Meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam program.
- Program yang dilaksanakan semakin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan anggota serta kondisi lingkungan sekitarnya.

- Jangkauan program menjadi lebih luas dengan menggunakan dana yang sama.
- Mengurangi ketergantungan kepada pihak luar.
- Menimbulkan rasa memiliki terhadap program yang akan menghasilkan kebersamaan dan solidaritas.
- Anggota menjadi lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan program.
- Menciptakan persatuan di tingkat anggota karena adanya kerja sama yang kuat di antara mereka.²³

3. Komunikasi

Komunikasi dalam konteks interaksi kelompok memiliki peran yang cukup sentral. Jika dicermati lebih seksama, banyak masalah yang muncul dalam kelompok disebabkan oleh komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Masalah komunikasi dapat menjadi sangat sensitif ketika masing-masing pihak yang terlibat tidak memiliki pemahaman atau pengertian yang sama.

Ada empat hal yang perlu diketahui dan dipraktekkan oleh setiap anggota dan pemimpin kelompok saat melakukan komunikasi di kelompoknya, yaitu :

- 1) Kemauan mendengarkan

²³ Agung Widodo dkk, Teknik Dasar Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Yayasan Insan Sebada, 2011).hal.14.

Upaya untuk mendengarkan dengan hati akan mengurangi bias komunikasi.

2) Kemauan untuk memberi pernyataan yang jelas

Pada hakikatnya komunikasi merupakan kegiatan menyatakan gagasan atau isi hati dan pikiran serta menerima umpan balik yang berarti menafsirkan pernyataan tentang gagasan orang lain. Untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain secara jelas, maka gagasan tersebut harus jelas bagi diri sendiri.

3) Keterbukaan

Kemauan membuka diri berarti kemampuan untuk berbicara secara jujur dan lengkap tentang keadaan dirinya. Terutama keberanian mengungkapkan emosi yang dirasakan, karena apabila dipendam atau diterima pada saat meledak tidak dapat dikendalikan.

4) Kemauan dan kesanggupan memberikan umpan balik

Umpan balik merupakan tanggapan pendengar terhadap pembicara. Sebuah komunikasi akan dianggap berhasil ketika mampu menghasilkan umpan balik yang tepat.²⁴

²⁴ Ibid.hal.16

4. Kerjasama

Kerjasama dalam sebuah kelompok akan terjadi ketika partisipasi dan komunikasi antar anggota telah terbangun dengan baik. Disinilah peran dan kemampuan pemimpin untuk menggerakkan dan memfasilitasi proses interaksi dalam kelompok sangat dibutuhkan. Peran dan kemampuan tersebut akan sangat membantu anggota dalam menumbuhkan motivasi dalam diri mereka sebagai anggota kelompok. Hal ini menjadi penting karena kerja sama dalam kelompok akan terwujud jika motivasi anggota kelompok telah terbangun serta telah terjadi kesepahaman persepsi antara anggota dengan pemimpin kelompok tentang tujuan yang hendak dicapai.²⁵

5. Pengembangan Diri dalam Kelompok

Pengembangan diri dalam kelompok sebenarnya merupakan proses pembelajaran bagi anggota dan pemimpin kelompok dalam berinteraksi dan berkreasi. Proses pembelajaran dapat terjadi melalui proses partisipasi, komunikasi dan kerja sama di dalam kelompok.²⁶

Proses pemberdayaan masyarakat dititikberatkan pada memulihkan dan melembagakan kembali modal sosial yang dimiliki masyarakat, yakni dengan mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan kepedulian dan kesatuan serta solidaritas sosial untuk bahu-membahu dan bersatu-

²⁵ Ibid.hal.17

²⁶ Ibid.hal.18

padu menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada nilai universal kemanusiaan, kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan.

siklus pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok adalah siklus kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat di kelurahan/desa setempat. Peran pendampingan pihak luar (fasilitator, karkot, Pemerintah kota/kabupaten, dll), hanyalah sebagai pendamping pembelajaran agar prakarsa, komitmen, kepedulian, motivasi, keputusan dan ikhtiar dari masyarakat benar-benar berbasis pada nilai-nilai luhur dan kebutuhan nyata masyarakat.

8. Hakikat Evaluasi Program

Menurut Sutisna (2000 :250) bahwa : “Evaluasi program adalah unsur lain yang sangat penting dari keseluruhan proses pengelolaan kegiatan. Evaluasi program, pada umumnya berkaitan dengan usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Evaluasi program adalah proses yang menentukan betapa baiknya organisasi, program-program atau kegiatan-kegiatan sedang atau telah mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, evaluasi program adalah membandingkan hasil-hasil yang sebenarnya dengan yang dikehendaki dan merumuskan pendapat tentang perbuatan (performance) organisasi dan anggota nya didasarkan pada perbandingan itu.”²⁷

Aktivitas mengevaluasi program sangat diperlukan pertimbangan yang sistematis, rencana, analisis sebab akibat, penyusunan instrumen evaluasi, penyusunan kriteria, serta, deskripsi program dengan jelas.

²⁷Sutisna, Oteng. 2000. Administrasi Pendidikan Dasar Teoretis untuk Praktek Profesional. Bandung.Angkasa. hal.250

Pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan, terutama untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program itu.

Menurut Sutisna (2000:252) bahwa : “Fungsi utama evaluasi adalah memberikan data informasi yang benar mengenai pelaksanaan suatu program, sehingga pembinaan program tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat, apakah program itu akan diteruskan, ditunda ataukah digagalkan sama sekali. Maka dengan demikian, evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pelaksanaan suatu program. Di samping itu, evaluasi berfungsi pula sebagai suatu usaha untuk: (a) menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program, (b) menemukan faktor penghambat pelaksanaan program, (c) menemukan penyimpangan atau kekeliruan pelaksanaan program dan (d) memperoleh bahan untuk penyusunan saran perbaikan, perubahan, penghentian dan penyempurnaan program”²⁸

Jadi, dengan menggunakan proses evaluasi program itu efektivitas seluruh organisasi dan tiap-tiap bagiannya bisa ditentukan. Tidak saja efektivitas program dan jasa organisasi yang hendaknya ditentukan, juga proses-proses yang digunakan oleh pengelolaan kegiatan hendaknya dinilai. Proses-proses ini dimaksudkan untuk memperbaiki efektivitas organisasi pada umumnya dan sering mempengaruhi langsung kualitas program-program yang disediakan. Setidak-tidaknya hendaknya dilakukan evaluasi program periodik tentang efektivitas dari pengambilan keputusan, perencanaan, komunikasi, dan proses-proses lain yang digunakan oleh pengelolaan kegiatan.

Semua kegiatan yang didesain untuk membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya hendaknya dinilai. Evaluasi program yang dilakukan dengan terus-menerus sangat penting oleh karena harus menjadi landasan setiap

²⁸ Ibid.hal.252

usaha perbaikan dan penyesuaian kembali di semua bidang pengelolaan kegiatan. Para pengawas tidak akan dapat membuat saran-saran untuk perbaikan organisasi dan program PNPM Mandiri Perkotaan yang diinginkan, kecuali jika pada mereka tersedia hasil-hasil penilaian.

Ada banyak model yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi program khususnya program pendidikan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model tersebut, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. (Suharsimi Arikunto dan Cecep Safruddin Abdul Jabbar : 2004).

Menurut Stephen Isaac dan Willian B. Michael (1984 : 7) model-model evaluasi dapat dikelompokkan menjadi enam yaitu :

1. *Goal Oriented Evaluation*.

Dalam model ini, seorang evaluator secara terus menerus melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian yang terus-menerus ini menilai kemajuan-kemajuan yang dicapai peserta program serta efektifitas temuan-temuan yang dicapai oleh sebuah program. Salah satu model yang bisa mewakili model ini adalah *discrepancy model* yang dikembangkan oleh Provus. Model ini melihat lebih jauh tentang adanya kesenjangan (*Discrepancy*) yang ada dalam setiap komponen yakni apa yang seharusnya dan apa yang secara riil telah dicapai.

2. *Decision Oriented Evaluation*

Dalam model ini, evaluasi harus dapat memberikan landasan berupa informasi-informasi yang akurat dan obyektif bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan program. Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh stufflebeam merupakan salah satu contoh model evaluasi ini. Model CIPP merupakan salah satu model yang paling sering dipakai oleh evaluator. Model inuyujii terdiri dari 4 komponen evaluasi sesuai dengan nama model itu sendiri yang merupakan singkatan dari *Context*, *Input*, *Process* dan *Product*.

Evaluasi konteks (*context evaluation*) merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan (*rationale*) dalam penentuan tujuan (Baline R. Worthern & James R Sanders : 1979) Karenanya upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan (*goal*).

Evaluasi input (*input evaluation*) merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan program.

Evaluasi proses (*process evaluation*) diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut sudah dilaksanakan. Ketika sebuah program telah disetujui dan dimulai, maka dibutuhkanlah evaluasi proses dalam menyediakan umpan balik (*feedback*) bagi orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program tersebut.

Evaluasi Produk (*product evaluation*) merupakan bagian terakhir dari model CIPP. Evaluasi ini bertujuan mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi produk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input. Dalam proses ini, evaluasi produk menyediakan informasi apakah program itu akan dilanjutkan, dimodifikasi kembali atau bahkan akan dihentikan

Evaluasi ini menggunakan metode CIPP untuk mengidentifikasi sejumlah bagian yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan efisiensi dan dampak program. Evaluasi ini terdiri dari Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan diwilayah Kelurahan Sukmajaya sejak tahun 2009 dan sampai dengan saat ini belum melakukan evaluasi pengelolaan program sehingga aktivitas kegiatan kurang terarah pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), yaitu meliputi masyarakat sebagai penyelenggara program pembangunan, pengendalian operasi dan pemeliharaan. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari program. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*), yaitu dampak dari hasil kegiatan evaluasi ini meliputi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah kelurahan Sukmajaya yang terdiri dari segi aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

3. *Transactional Evaluation*

Dalam model ini, evaluasi berusaha melukiskan proses sebuah program dan pandangan tentang nilai dari orang-orang yang terlibat dalam program tersebut.

4. *Evaluation Research*

Sebagaimana disebutkan diatas, penelitian evaluasi memfokuskan kegiatannya pada penjelasan dampak-dampak pendidikan serta mencari solusi-solusi terkait dengan strategi instruksional.

5. *Goal Free Evaluation.*

Model yang dikembangkan oleh Michael Scriven ini yakni *Goal Free Evaluation* Model justru tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan program sebagaimana model *goal oriented evaluation*. Yang harus diperhatikan justru adalah bagaimana proses pelaksanaan program, dengan jalan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi selama pelaksanaannya, baik hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif.

6. *Adversary Evaluation*

Model ini didasarkan pada prosedur yang digunakan oleh lembaga hukum. Dalam prakteknya, model *adversary* terdiri atas empat tahapan yaitu :

- (1) Mengungkapkan rentangan isu yang luas dengan cara melakukan survey berbagai kelompok yang terlibat dalam sa tu program untuk menentukan kepercayaan itu sebagai isu yang relevan.
- (2) Mengurangi jumlah isu yang dapat diukur.
- (3) Membentuk dua tim evaluasi yang berlawanan dan

memberikan kepada mereka kesempatan untuk berargumentasi. (4) Melakukan sebuah debat pendapat yang formal. Tim evaluasi ini kemudian mengemukakan argumentasi-argumentasi dan bukti sebelum mengambil keputusan.

Perencanaan dilaksanakan dengan tujuan menyusun gambaran umum masalah dan sumber daya, menyusun rencana atau program kegiatan prioritas masing-masing bidang, juga perencanaan dapat dipandang sebagai suatu proses penentuan dan penyusunan program-program kegiatan yang dilakukan, berorientasi ke masa depan, spesifik dan operasional. Aspek yang diperhatikan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan.

Menurut Ismail (1989 : 97) antara lain : “(a) Harus jelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, (b) Realistis, artinya mengandung harapan-harapan, relevan dengan tujuan memiliki prosedur, metode dan teknik pelaksanaan yang tepat dan tetap mempertimbangkan sumber daya manusianya. (c) Harus terpadu dan sistematis, yakni memperhatikan unsur-unsur insani dan non insani, memiliki tata urutan berdasarkan skala prioritas”.

Koentjaraningrat (1981:7) yang menegaskan bahwa : “Fungsi evaluasi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pembinaan dan penilaian”. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Sudjana (2000: 312) bahwa : “Dalam usaha melaksanakan evaluasi program ini dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: (a) pembuatan rencana evaluasi program, (b) pelaksanaan evaluasi program dan (c) pemantauan, (d) tindak lanjut dan (e) pelaporan.”

Kelima aktivitas ini diuraikan sebagai berikut :

1. Pembuatan Rencana Evaluasi Program

Pelaksanaan evaluasi program dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi. Dalam evaluasi program ini ada 3 jenis data atau informasi yang diperlukan. Pertama, mengenal dokumen program tertulis.

Kedua, informasi mengenai proses pelaksanaan program di lapangan dan ketiga, informasi mengenai hasil dan dampak program itu.

Dalam usaha menilai program, sering pula digunakan kriteria atau patokan, yaitu suatu pengertian yang dapat dijadikan dasar (standar) menilai atau mengukur.

Menurut Raka (1981: 22) bahwa : “Pada dasarnya, dapat dibedakan 2 jenis kriteria, yaitu kriteria internal dan kriteria eksternal. Kriteria internal adalah standar- yang dijabarkan dari dalam rancangan program, dan kriteria eksternal adalah standar-standar yang diperoleh dari luar program.

Kriteria internal suatu program dapat ditinjau dari segi konsistensi, yaitu ketepatan atau kesesuaian antara komponen yang satu dengan komponen lainnya dalam program tersebut. Kesesuaian atau ketepatan antara komponen-komponen itu, misalnya antara (a) tujuan dengan kegiatan-kegiatan, (b) tujuan dengan kemampuan pelaksana, (c) tujuan dengan isi atau pesan yang disampaikan, (d) tujuan dengan instrumen evaluasi, (e) tujuan atau output program dengan biaya, apakah biaya yang direncanakan cukup untuk menunjang pelaksanaan program itu sampai berhasil.

Kriteria eksternal suatu program, misalnya dapat ditinjau dari:

a. Mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan umum dan tujuan program.

Biasanya suatu program disusun dan dilaksanakan berdasarkan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut; dianggap sebagai kriteria eksternal. Pengaruh ganda (*multiplier effects*). Suatu program mempunyai pengaruh ganda, yaitu kalau hasilnya mempengaruhi orang-orang yang bukan menjadi kelompok sasaran program itu.

- b. Pemberian pertimbangan dilakukan oleh evaluator yang dipandang ahli dalam bidangnya harus realistis atau dapat diukur.

Pertimbangan itu merupakan proses berpikir secara subjektif, walaupun pertimbangan itu didasarkan pada data atau informasi yang telah dikumpulkan. Ada dua pendekatan dalam pemberian pertimbangan. Pertama, pendekatan pengukuran pencapaian tujuan, yaitu menyoroti efektivitas dan efisensi pencapaian tujuan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengukuran. Kedua, pendekatan situasi, yang memberikan perhatian besar pada konteks lingkungan sosial tempat program itu berlangsung, atau dengan ungkapan lain memikirkan dampak program itu secara keseluruhan pada lingkungan sosial.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan perencanaan evaluasi program dalam penelitian ini adalah pengambilan keputusan mengenai apa yang dilaksanakan dan merupakan langkah awal sebelum kegiatan evaluasi program dimulai. Aktivitas perencanaan evaluasi program diindikasikan dengan aktivitas (1) mengidentifikasi tujuan, (2) realistis atau dapat diukur (3) terpadu dan sistematis.

2. Pelaksanaan Evaluasi Program

Kegiatan pelaksanaan evaluasi program sesungguhnya sama dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi mengenai proses pelaksanaan program di lapangan. Tetapi tujuan monitoring terutama untuk meluruskan proses pelaksanaan program, akibat adanya kendala-kendala yang timbul di luar perhitungan. Dalam pembuatan rencana evaluasi program ini, maka

perlu dipertimbangkan tiga komponen evaluasi program yaitu deskripsi program, kriteria dan judgement (pertimbangan).

Informasi mengenai program merupakan bahan penting untuk pelaksanaan evaluasi.

Menurut Singarimbun (1999 :129) bahwa : “Informasi mengenai program yang akan dievaluasi dapat berupa (1) dokumen tertulis program yang akan dievaluasi, (2) gagasan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang dilaksanakannya program tersebut, (3) hasil uji coba ataupun flesibility study tentang kemungkinan tercapainya tujuan program itu, (4) hasil studi kasus atau informasi deskriptif mengenai pelaksanaan program, (5) hasil riset pelaksanaan program itu”.

Studi mengenai program itu, baik pelaksanaan maupun hasil atau dampak program tersebut, biasanya berkaitan dengan persepsi dan sikap orang-orang yang bersangkutan dengan program, yaitu para pelaksana program para konsumen program, perencana program dan evaluator sendiri. Pendapat para evaluator merupakan pendapat yang penting bagi pimpinan atau pengarah kebijakan, karena mereka dianggap lebih ahli. Semua komponen program, proses maupun hasil serta dampak program diperinci dan dianalisis secara sistematis, yang selanjutnya masing-masing komponen, proses, hasil dan dampak program setelah dianalisis kemudian diberi judgement (pertimbangan).

Pelaksanaan kegiatan evaluasi bertujuan mendayagunakan sumber daya yang ada guna teroganisirnya pelaksanaan program atau kegiatan. Adapun pengorganisasian itu kegiatannya mengacu pada hal-hal sebagai berikut: (a) Mengorganisasikan tujuan ataupun sasaran evaluasi program, (b)

Menjabarkan sejumlah kegiatan dan personil yang mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut. (c) Memberikan informasi untuk kejelasan tugas-tugas yang diemban dan mengupayakan seluruh potensi yang menunjang pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan evaluasi program, diperlukan instrumen evaluasi. Pada umumnya instrumen evaluasi itu terdiri dari pedoman observasi, pedoman wawancara, angket (daftar pertanyaan), skala sikap/minat dan skala keterampilan. Instrumen evaluasi itu biasanya disusun oleh para ahli. Aspek yang terpenting adalah kita harus mampu menggunakan instrumen yang telah dibuat itu. Dalam setiap instrumen biasanya disertai petunjuk bagaimana mengerjakan instrumen tersebut.

Maksud proses evaluasi program ialah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Karena itu, suatu rencana tindakan perlu disusun dan dimulai sebelum evaluasi program itu sendiri akan membuktikan kegunaannya. Ada banyak aspek pada suatu usaha yang bisa dinilai, untuk mencoba suatu evaluasi program umum tentang seluruh aktivitas organisasi. Melalui hasil kegiatan penilaian dapat memusatkan perhatian kepada beberapa bagian tertentu dari keseluruhan usaha. Namun dalam hal ini hubungan-hubungan dari bagian-bagian itu kepada keseluruhannya harus tetap diperhatikan.

Langkah pertama dalam proses evaluasi program ialah pilihan dan perumusan tentang apa yang hendak dinilai. Aspek yang berikut adalah

sekedar beberapa contoh dari sekian banyak pertanyaan yang bisa memberi arah kepada proses penilaian.

Evaluasi program ialah penetapan kriteria untuk mempertimbangkan apapun yang akan dinilai itu. Pada dasarnya kriteria ini bersifat filosofis, karena ia mewakili sistem nilai yang dipunyai oleh orang atau orang-orang yang bertanggung jawab tentang penilaian. Ini tidak berarti bahwa kriteria itu tidak didasarkan fakta-fakta. Orang-orang yang menyusun kriteria itu tentu akan menggunakan pengetahuan yang tersedia dan pendapat para ahli; namun kriteria yang diterima itu akhirnya dirumuskan, ia akan mencerminkan suatu sistem nilai yang disetujui oleh mereka yang merumuskannya. Kriteria itu akan menunjukkan apa yang dianggap baik, yaitu apa yang seharusnya, oleh para evaluasi program mengenai apa yang sedang dinilai.

Aspek yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi program PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok adalah orang-orang yang akan terlibat dalam evaluasi program sama-sama menyetujui kriteria yang akan digunakan itu; jika tidak, tak akan ada dasar yang sama bagi pertimbangan tentang arti data yang akan dikumpulkan. Kriteria itu juga hendaknya disusun dalam bentuk yang sesuai sehingga bisa mengarahkan pengumpulan dan interpretasi data mengenai program atau kegiatan yang hendak dinilai.

Proses evaluasi ialah penetapan tentang data macam apa yang benar-benar berhubungan dengan kriteria itu dan bagaimana data itu bisa dikumpulkan. Suatu cara mengumpulkan data yang baik ialah menghasilkan

penghimpunan informasi yang diperlukan dalam bentuk yang segera bisa dipakai. Lagi pula data yang terkumpul itu harus benar-benar berhubungan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data berkenaan dengan kriteria yang telah ditetapkan, akan tetapi data yang tepat memang menyediakan dasar bagi pembuatan pertimbangan yang rasional dalam hubungan dengan kriteria yang telah disepakati itu.

Dalam kenyataannya langkah-langkah itu mungkin tidak benar-benar terpisah dalam waktu. Selagi observasi sedang dilakukan, kriteria yang ditetapkan semula dapat saja mengalami penyesuaian dan, pada gilirannya, mengubah observasi. Interpretasi data memusatkan perhatian pada kriteria maupun observasi yang telah dibuat, dan sebagai akibatnya bisa mempengaruhi salah satu di antaranya. Karena itu, jika evaluasi program menyangkut efektivitas yang sedang berubah dari suatu program atau paktek, seperti yang sering terjadi dalam organisasi pendidikan, pengumpulan data itu hendaknya dicapai dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Berdasarkan uraian di atas maka inti aktivitas evaluasi program adalah pelaksanaan kegiatan evaluasi program yang bertujuan untuk mengaktifkan semangat dan memotivasi sehingga dengan senang hati melakukan fungsi organisasi. Sehubungan dengan itu aspek yang perlu diperhatikan yaitu menginformasikan waktu pelaksanaan kegiatan, menjabarkan tugas dan kejelasan metode tugas masing-masing personil.

3. Tindak Lanjut Program

Fungsi tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi program pada PNPM adalah mengarahkan dan menuntun agar suatu kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam bingkai aturan prosedural sesuai mekanisme. Untuk hal-hal itu perlu diperhatikan dalam tindak lanjut.

Menurut Sutisna (2000 : 251) tindakan lanjut evaluasi program berupa (1) Membimbing hasil temuan pelaksanaan, (2) Melakukan tindakan perbaikan dan (3) Menetapkan solusi. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Sudjana (2000 : 123) bahwa kegiatan tindak lanjut pada evaluasi program berfungsi untuk memperoleh umpan balik yang dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan program pembinaan dan pengembangan program yang mencakupi (a) Bertindak preventif terhadap penyimpangan program kerja, (b) Membimbing untuk peningkatan prestasi, (c) Memberi sanksi untuk perbaikan kinerja, (d) Menetapkan solusi untuk peningkatan kerja.

Fungsi tindak lanjut program bertujuan mengukur tingkat pencapaian kegiatan. Evaluasi program dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut (a) Mengevaluasi pencapaian rencana yang diprogramkan, (b) Mengkaji/menganalisis faktor penghambat dan pendukung pencapaian tujuan kegiatan, (c) Menindak lanjuti hasil evaluasi program kegiatan.

Sesuai dengan uraian di atas maka yang dimaksud dengan tindak lanjut evaluasi program dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengembangkan program berdasarkan kesesuaian aktivitas perencanaan dengan data yang telah diperoleh pelaksanaan program tersebut. Aktivitas tindak lanjut dalam penelitian ini diindikasikan dengan beberapa aspek yaitu (1)

Membimbing atau membina program (2) Melakukan tindakan perbaikan dan (3) Menetapkan solusi.

4. Aktivitas Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur program atau tidak. Kegiatan ini dilakukan di seluruh tahapan kegiatan program, sejak pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Pelaku pemantauan adalah masyarakat, aparat pemerintah di berbagai tingkat, konsultan, fasilitator, lembaga donor, dan lain-lain. Manfaat dari pemantauan adalah untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan, sebagai input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program dan dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku program dan masyarakat.

Jenis kegiatan pemantauan dalam program ini meliputi :

1) Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat

Pemantauan partisipatif oleh masyarakat adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik program dan mereka bertanggungjawab memantau proses kegiatan program tersebut. Dalam forum musyawarah desa, masyarakat dapat memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan secara sukarela demi kepentingan masyarakat desanya. Selain itu ada pemantuan melalui kunjungan silang antar desa.

2) Pemantauan oleh Pemerintah yang Berwenang

Pemantauan oleh pemerintah yang berwenang adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam program (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, Pengawas Sekolah, Puskesmas, dll) mempunyai tugas mengunjungi lokasi pelaksanaan program, baik secara rutin maupun berkala untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan membantu memfasilitasi penyelesaian masalah.

3) Pemantauan oleh Konsultan dan Fasilitator

Pemantauan oleh konsultan dan fasilitator adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh konsultan atau fasilitator. Konsultan pusat, konsultan provinsi, konsultan kabupaten, dan FK mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan PNPM Generasi. Masyarakat wajib melakukan pengecekan untuk mengetahui pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur program juga diterapkan dengan benar.

5. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan program. Mekanisme pelaporan dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional konsultan,

sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan. Sistem laporan dari desa agar dibuat sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administratif dari pelaksana kegiatan di desa. Metode laporan berupa data dan atau informasi yang benar dan akurat jauh lebih diutamakan daripada bentuk laporannya.

9. Faktor-Faktor yang Menghambat Evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan

Di dalam meningkatkan fungsi dan pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Sukmajaya Kota Depok, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu.

a) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Setiap kegiatan yang ditawarkan atau disosialisasikan kepada masyarakat sangat sulit mengatakan susah untuk diterima. Namun berbagai persepsi dan sikap masyarakat terkadang pesimis terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut Sarief (1984:74) bahwa : “Tingkat pendidikan setiap orang dapat berpengaruh pada pola pikir tindakan dan pemahamannya terhadap suatu hal baru yang terjadi di lingkungannya. Berpijak dari ungkapan tersebut tidak selamanya kegiatan yang diharapkan tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat langsung beroleh tanggapan positif terhadap penggeneralisasian. Sebelumnya mendapat tantangan dan hambatan”.

Terkait dengan pengelolaan (PNPM) itu sendiri, hal tersebut benar-benar perlu disikapi dan ditanggapi positif sehingga harapan-harapan yang diinginkan dapat tercapai, namun sebaliknya jika sikap arogan dan emosi

yang tak terkendali menanggapi sikap-sikap masyarakat yang dikedepankan maka gagallah harapan-harapan tersebut.

b) Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi bila ditinjau dari aktivitas suatu organisasi menurut Tjokrowinoto (1974:37) bahwa : “Partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan, bersama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut.” Kemudian menurut Davis (1977:185) bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut serta bertanggung jawab didalamnya. Dalam definisi ini kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi.

Partisipasi itu menjadi lebih baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik anggota dalam memberikan inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam partisipasi terdapat unsur keterlibatan pengelola dan tutor dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, dan kemauan anggota untuk berinisiatif dan berkreasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi. Sifat dari partisipasi itu yaitu adanya kesadaran dari anggota kelompok, tidak adanya unsur paksaan, dan anggota merasa ikut memiliki.

Hal ini senada dengan pendapat dari Nawawi dan Marthini (1995:77) bahwa : “Fungsi partisipasi tidak sekedar berlangsung dan bersifat dua

arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif, antara pemimpin dengan sesama orang yang dipimpin. Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompoknya memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok dari orang lain “

Pendapat di atas menekankan bahwa perilaku partisipatif pengelola dan tutor dalam kegiatan organisasi hanya mungkin terwujud, jika dalam mengelola kegiatan dapat mengembangkan komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat, gagasan, dan pandangan dalam memecahkan masalah–masalah seperti untuk mengambil keputusan-keputusan. Dari sisi lain perilaku partisipatif juga kesediaan para pembina untuk tidak berpangku tangan pada saat masyarakat yang dipimpin melaksanakan keputusannya. Pemimpin tidak boleh sekedar mampu membuat keputusan dan memerintah pelaksanaannya, tetapi juga ikut dalam proses pelaksanaannya, dalam batas–batas tidak menggeser dan menggantikan petugas yang bertanggung jawab melaksanakannya.

Sehubungan dengan resiko yang dapat terjadi dalam pengambilan keputusan, setiap pimpinan dan staf dituntut untuk rasa tanggung jawabnya, dengan tidak mengelak dari tugas, apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan. Untuk itulah dalam kepemimpinan yang efektif, pengambilan keputusan tidak

sekedar harus cepat, tetapi juga hati-hati dan cermat agar diperoleh keputusan yang tepat.

Proses pengambilan keputusan seperti yang dipaparkan di atas telah menggambarkan bahwa dinamika kelompok sangat tergantung pada keputusan–keputusan yang ditetapkan. Dari proses itu dihasilkan keputusan–keputusan yang pelaksanaannya menjadi kegiatan yang berpengaruh langsung pada perkembangan dan kemajuan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok.

Adapun prasyarat-prasyarat sebagai kondisi pendahuluan agar tercapainya partisipasi oleh Westra (1977:280-281) : “(1) tersedianya waktu yang cukup untuk mengadakan partisipasi, (2) pembiayaan hendaknya tidak melebihi nilai-nilai hasil yang diperoleh, (3) pelaksanaan partisipasi haruslah memandang penting serta urgen terhadap kelompok kerja, (4) peserta partisipasi haruslah mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu agar efektif untuk dilibatkan, (3) pelaku partisipasi haruslah berhubungan agar saling tukar ide, (4) tidak ada pihak-pihak yang merasa terancam dengan adanya partisipasi itu, dan (5) partisipasi agar efektif jika didasari atas asas-asas adanya kebebasan kerja.”

Menyimak beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mengukur partisipasi pengelola dan tutor dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat dari seberapa jauh keterlibatan personal yang terdiri dari tutor dan pengelola dalam aktivitas PNPM Mandiri Perkotaan, dimana mereka menjadi anggotanya. Partisipasi tersebut akan terwujud apabila pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan memberikan peluang bagi tutor dan pengelola untuk mengembangkan potensi berpikir yang mereka miliki. Peluang untuk berpartisipasi tersebut luas di dalam kegiatan PNPM

Mandiri Perkotaan yang bersifat demokratis baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam praktek pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan keputusan. Dengan demikian PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu organisasi yang memungkinkan bagi pengelola dan tutor untuk berpartisipasi penuh.

Terkadang karena tuntutan kebutuhan menjadi salah satu penyebab kurang suksesnya pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan karena dengan berbagai kesibukan untuk kerja mencari nafkah, sehingga sulit untuk mengkaitkan masyarakat ikut berperan atau berpartisipasi dalam mengoptimalkan dalam pengelolaan PNPM, meskipun apa yang dilaksanakan sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kesadaran dan proaktif masyarakat ikut berpartisipasi langsung dalam pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan sukrajaya Kota Depok dapat digalakkan dan ditumbuhkembangkan sehingga kehadirannya benar-benar dan memberi arti penting dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dalam kehidupan.

10. Usaha-Usaha Meningkatkan Evaluasi Program Pengelolaan (PNPM)

Efektivitas pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukrajaya Kota Depok selain mempertahankan faktor-faktor yang mempengaruhinya, perlu pula dilaksanakan usaha-usaha dalam peningkatannya.

Menurut Sudjana (2003:1–2) menjelaskan bahwa “Pengelolaan (PNPM) selain mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan dan penilaian. Untuk meningkatkannya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan, kolaboratif, partisipatif berkelanjutan dan budaya.

Selanjutnya dijelaskan bentuk-bentuk pendekatan itu adalah :

a) Pendekatan Kemanusiaan (*Humanistic Approach*)

Dalam pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok, warga belajar dan sumber daya manusia lainnya dipandang sebagai subyek, bukan obyek. Mereka dipandang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan diri, masyarakat dan lembaga. Sehubungan dengan itu setiap warga belajar harus dilakukan secara wajar, dan bila mereka diajak untuk berdialog untuk membicarakan pengembangan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok ke depan.

b) Pendekatan Kolaboratif (*Collaborative Approach*)

Pendekatan ini mengisyaratkan bahwa banyak pihak yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sehingga para penyelenggara, pengelola dan pendamping PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Kerja sama pihak yang dimaksud adalah dengan instansi-instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun perusahaan-perusahaan yang ada. Oleh karena itu PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota

Depok bersama pihak terkait dapat melaksanakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat secara sinergi.

c) Pendekatan Partisipatif (*Participatory Approach*)

Pendekatan ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok berupaya seoptimal mungkin melibatkan warga belajar dan masyarakat serta instansi-instansi terkait dalam melakukan fungsi-fungsi pengelolaan, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program terhadap hasil dan dampak program-program PNPM Mandiri Perkotaan.

d) Pendekatan Berkelanjutan (*Continuation Approach*)

Pendekatan ini mengandung makna bahwa PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok dan pelaksanaan fungsi pengelolaannya dilakukan secara terus menerus. Sehubungan dengan itu pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok diharapkan dapat menumbuhkembangkan kader-kader dari masyarakat sehingga pada gilirannya nanti mereka mampu mengelola program-program di PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok tanpa dominasi oleh pihak-pihak lain.

e) Pendekatan Budaya (*Cultural Approach*)

Pendekatan budaya memiliki arti bahwa memberi arah kepada penyelenggara, pengelola dan pendamping PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok untuk dapat menghargai budaya

termasuk tradisi dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat, serta dapat memanfaatkan budaya setempat dalam pengelolaan program-program PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai usaha dalam meningkatkan pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Kelurahan Sukmajaya Kota Depok bagi tutor maupun pengelolannya harus mampu menerapkan dan mengaktualisasikan berbagai pendekatan kepada masyarakat pihak-pihak terkait lainnya. Dan melalui pengimplementasian pendekatan-pendekatan pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan dengan mudah dapat diatasi untuk pemecahannya.

B. KERANGKA BERPIKIR

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan, begitu juga nama generic lembaga kepemimpinan masyarakat berubah dari BKM menjadi LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat).

Keberadaan PNPM sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin, akan efektivitas proses dan hasil penyelenggaraannya sangat tergantung pada kemampuan pengelola, untuk menjabarkan fungsi-fungsi evaluasi program yang mencakupi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Selain itu juga tidak lepas dari peran dan partisipasi unsur-

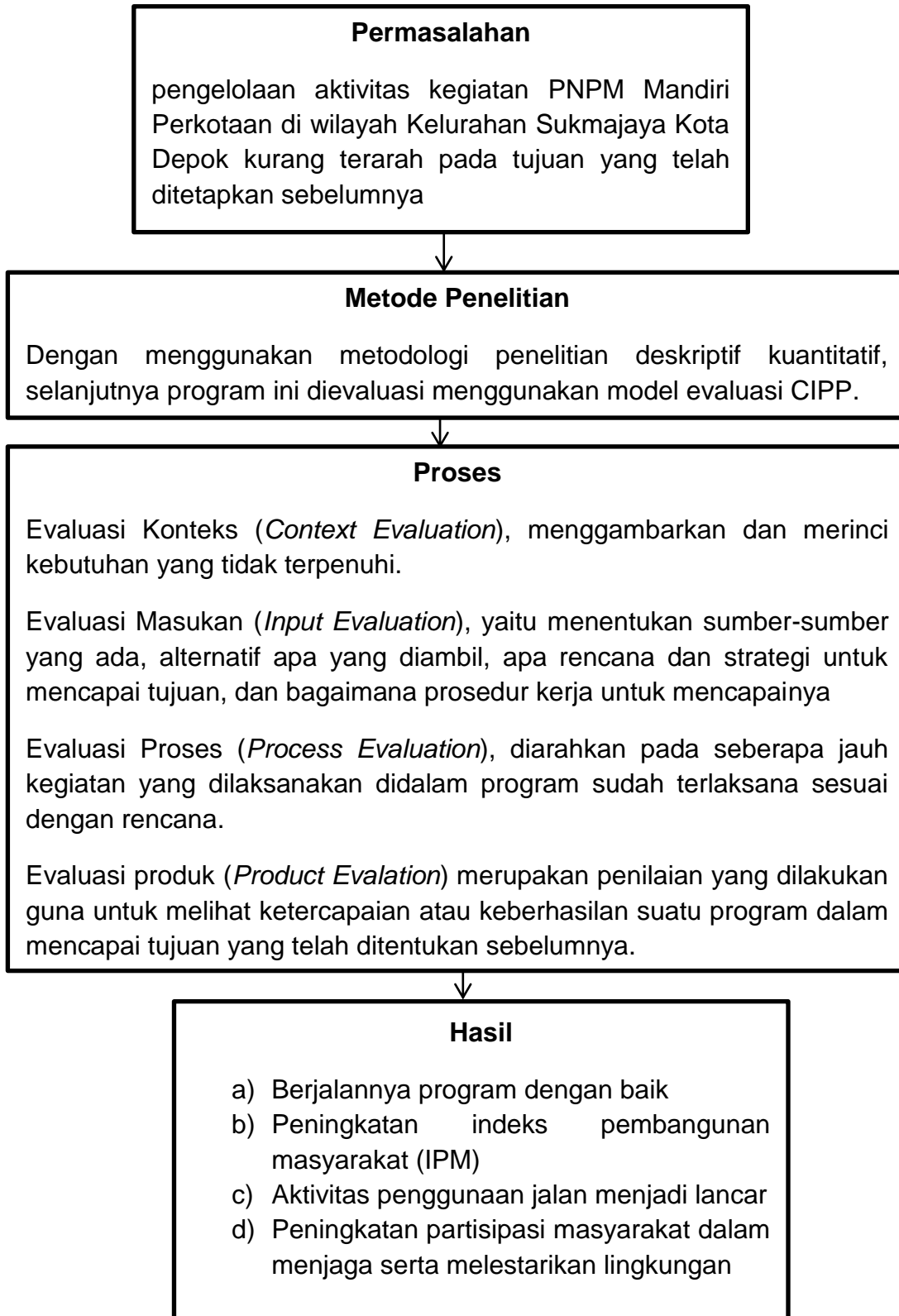
unsur terkait *stockholder* untuk memotivasi warga masyarakat agar benar-benar dapat mendukung wadah tersebut. Akuntabilitas pengelola dan tutor terhadap optimalisasi pemanfaatan PNPM selain terwujud dalam penjabaran fungsi-fungsi pelaksanaan evaluasi program, juga harus nampak dalam peningkatan dan pengembangan kegiatan melalui usaha-usaha tertentu dengan berbagai pendekatan.

PNPM Mandiri Perkotaan yang di mana merupakan salah satu alternatif sebagai sarana pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan Sukmajaya Depok dan memenuhi peningkatan taraf hidup. Dalam hal ini, Pada intinya evaluasi program pada PNPM adalah suatu upaya untuk peran program ini bagi banyak orang. Pengelola dan masyarakat sangat berkepentingan dengan evaluasi program itu karena mereka disertai tanggung jawab atas pengembangan program pendidikan yang baik.

Proses pemberdayaan masyarakat dititikberatkan pada memulihkan dan melembagakan kembali modal sosial yang dimiliki masyarakat, yakni dengan mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan kepedulian dan kesatuan serta solidaritas sosial untuk bahu-membahu dan bersatu-padu menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada nilai universal kemanusiaan, kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa bila pelaksanaan evaluasi program dilaksanakan dengan baik maka dapat diketahui secara dini dan akurat ketercapaian program yang telah

dilaksanakan. Sebaliknya jika pelaksanaan evaluasi program tidak dilakukan secara optimal maka tingkat ketercapaian program tidak dapat diketahui dengan jelas dan sebagai akibatnya tujuan yang telah ditetapkan dalam aktivitas perencanaan tidak dapat tercapai dengan baik. Program PNPM Mandiri Perkotaan menjadi sarana bagi warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga serta melestarikan lingkungan.



Gambar II.4 Bagan Kerangka Berfikir